

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF INVESTMENT, REGIONAL SPENDING, AND
UNEMPLOYMENT RATE ON ECONOMIC GROWTH IN DKI JAKARTA
PROVINCE, 2014-2023**

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI, BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2014-2023**

Andhika Rizaldi¹, Dita Dismalasari Dewi²

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya^{1,2}
andhika.22159@mhs.unesa.ac.id¹, ditadewi@unesa.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of investment, regional government expenditure, and the unemployment rate on economic growth in DKI Jakarta Province during the 2014–2023 period. Economic growth is proxied by Gross Regional Domestic Product (GRDP) at current prices, while the independent variables include Domestic Investment (PMDN), Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), and the open unemployment rate. The analysis applies multiple linear regression using Stata, supported by classical assumption tests, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results confirm that the data meet all classical assumptions, indicating that the regression model is reliable and appropriate. Simultaneously, the three independent variables significantly influence GRDP, as indicated by a Prob > F value of 0.0024 and an adjusted R-squared of 0.8426, meaning that 84.26% of GRDP variation is explained by the model. However, partial testing reveals that only PMDN has a positive and statistically significant effect on economic growth, while APBD and the open unemployment rate show no significant impact. These findings suggest that strengthening domestic investment plays a crucial role in driving economic growth in DKI Jakarta, while improving the effectiveness of regional spending and unemployment policies remains necessary.

Keywords: Investment, Regional Government Expenditure, Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Economic Growth, DKI Jakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, belanja daerah, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta periode 2014–2023. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, sedangkan variabel independen meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta tingkat pengangguran terbuka. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Stata, disertai uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, bebas multikolinearitas, tidak mengalami heteroskedastisitas, dan tidak mengandung autokorelasi, sehingga model dinilai layak digunakan. Secara simultan, investasi, belanja daerah, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta dengan nilai Prob > F sebesar 0,0024 dan adjusted R-squared sebesar 0,8426 yang mengindikasikan bahwa 84,26 persen variasi PDRB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Namun secara parsial, hanya PMDN yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan APBD dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan iklim investasi domestik sebagai pendorong utama kinerja ekonomi DKI Jakarta, sementara efektivitas penggunaan APBD dan penanganan pengangguran perlu terus dioptimalkan agar memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Investasi, Belanja Daerah, Tingkat Pengangguran, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang dengan perekonomian nomor satu di Asia Tenggara, Indonesia menggunakan

laju pertumbuhan PDB riil sebagai indikator utama kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan PDB mencerminkan industrialisasi,

penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara wilayah, pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kontribusi kawasan urban sebagai pusat aktivitas ekonomi, khususnya Provinsi DKI Jakarta yang menjadi jantung perekonomian Indonesia dengan konsentrasi sektor jasa dan perdagangan tertinggi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif tinggi sepanjang periode 2014-2023, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan sektor jasa seperti informasi-komunikasi serta keuangan (Aryani, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, PDRB sempat mengalami kontraksi pada 2020 akibat pandemi COVID-19, diikuti pemulihan stabil dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai provinsi dengan dominasi perdagangan dan jasa, pengelolaan investasi domestik (PMDN) menjadi kunci utama untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1.	2014	1762316
2.	2015	1989088,75
3.	2016	2159073,62
4.	2017	2665353,86
5.	2018	2592606,57
6.	2019	2815636,16
7.	2020	2767273,49
8.	2021	2912885,34
9.	2022	3188541,22
10.	2023	3443026,23

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (tahun 2014-2023)

Pada Gambar 1, terlihat tren pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, Sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, yang tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode 2014-2023. Grafik ini menggambarkan fluktuasi relatif tinggi namun stabil secara keseluruhan, dengan kontraksi sekitar -2,36% pada 2020 akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas, diikuti pemulihan yang kuat hingga 2023, di mana DKI Jakarta berkontribusi besar melalui sektor jasa dan perdagangan yang mendominasi PDRB serta sangat dipengaruhi oleh dinamika investasi domestik (PMDN), belanja daerah (APBD), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tren pemulihan pasca COVID menegaskan resiliensi ekonomi Jakarta, dengan penguatan PMDN sebagai kunci utama menjaga keberlanjutan PDRB, sejalan dengan analisis regresi yang menunjukkan pengaruh positif signifikan PMDN, sementara optimalisasi APBD dan penanganan TPT diperlukan untuk dampak lebih nyata.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan output jangka panjang karena mampu menambah stok modal fisik, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru (S Sukirno, 2013; M. P. , Todaro & Smith, 2015) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berperan penting dalam penyediaan mesin, bangunan, peralatan produksi, infrastruktur transportasi, serta fasilitas usaha yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi daerah (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2024). Investasi domestik tidak hanya meningkatkan kemampuan produksi tetapi juga menciptakan efek berantai berupa penyerapan tenaga kerja,

peningkatan pendapatan rumah tangga, dan dorongan konsumsi riil yang berkelanjutan (M. P. Todaro & Smith, 2020). Di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa dan perdagangan, investasi domestik menjadi krusial untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan daya saing regional (Aryani, 2022).

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Christono & Putri, 2022) (Aryani, 2022), (Kurniawati et al., 2021), (Suryani dan Putra, 2024), serta (Amelia, 2025) menemukan bahwa PMDN mampu mendorong peningkatan PDRB maupun pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, hasil-hasil tersebut masih memperlihatkan variasi antar daerah, baik dari sisi besaran pengaruh maupun konteks wilayah penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat universal, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut pada wilayah dan karakteristik ekonomi yang berbeda untuk memperkuat pemahaman mengenai hubungan tersebut.

Kebijakan fiskal daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui penyediaan barang publik dan layanan dasar (Halim, 2019). APBD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, sistem transportasi massal, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Pengeluaran pemerintah daerah yang produktif tidak

hanya meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi juga menciptakan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa lokal (Musgrave & Musgrave, 1989) Selain itu, APBD yang dikelola secara efektif dapat merangsang masuknya investasi swasta melalui perbaikan iklim usaha, konektivitas logistik yang lebih baik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Suryani dan Putra, 2024). Pada daerah dengan kebutuhan infrastruktur tinggi seperti provinsi-provinsi besar di Indonesia, alokasi APBD yang tepat sasaran berpotensi menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

Secara empiris, sejumlah penelitian telah menunjukkan pengaruh positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di berbagai wilayah Indonesia. (Suryani dan Putra, 2024) menemukan bahwa APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali, menegaskan peran ekspansi fiskal daerah yang produktif sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi. Demikian pula, (Widodo, 2020) di Jawa Barat, (Pratiwi, 2021) di Sumatera Utara, serta (Mulyono, 2019) di Jawa Tengah melaporkan kontribusi signifikan dari belanja infrastruktur dan alokasi modal terhadap peningkatan output regional, meskipun pengaruhnya kadang dipengaruhi komposisi belanja. Oleh karena itu, efektivitas APBD sangat ditentukan oleh proporsi alokasi pada kegiatan produktif serta efisiensi pelaksanaan di tingkat daerah. Namun, temuan-temuan tersebut masih menunjukkan variasi hasil antar wilayah, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut pada konteks DKI Jakarta untuk mengonfirmasi konsistensi pengaruhnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator krusial yang mencerminkan kondisi pasar kerja dan tingkat pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu perekonomian (Badan Pusat Statistik (BPS)., 2024). TPT yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga berpotensi menurunkan output ekonomi potensial daerah (Mankiw, 2021). Pengangguran tidak hanya mengurangi kontribusi tenaga kerja terhadap produksi barang dan jasa tetapi juga menekan daya beli masyarakat, mengurangi permintaan konsumsi, dan melemahkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Blanchard & Johnson, 2013). Selain dampak langsung terhadap output, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan hilangnya human capital akibat kurangnya pengalaman kerja, terjadinya skill mismatch antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja, serta munculnya discouraged worker effect dimana pekerja potensial menyerah mencari kerja (M. P. , Todaro & Smith, 2015). Di wilayah perkotaan dengan struktur ekonomi kompleks seperti DKI Jakarta, dinamika pengangguran menjadi lebih rumit karena adanya sektor informal dan underemployment yang tidak tercakup sepenuhnya dalam indikator TPT resmi.

Penelitian empiris di Indonesia secara umum menunjukkan hubungan negatif antara TPT dan pertumbuhan ekonomi. (Suryani dan Putra, 2024) di Bali menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB provinsi tersebut. (Amelia, 2025) melaporkan hasil serupa di Jawa Tengah dimana TPT memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. (Setiawan, 2018) di Jakarta menunjukkan bahwa meskipun

TPT tidak selalu signifikan secara statistik, proporsi pekerja informal yang tinggi membuat indikator pengangguran terbuka kurang sensitif terhadap fluktuasi output ekonomi. (Nugroho, 2020) di Surabaya mengkonfirmasi bahwa dominasi sektor jasa membuat hubungan antara TPT dan PDRB menjadi lebih lemah dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi industri. (Lestari, 2021) di Bandung juga menemukan bahwa underemployment di kalangan pekerja muda memperlemah korelasi statistik antara pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh TPT terhadap pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di setiap wilayah.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, terlihat bahwa kajian empiris mengenai hubungan antara PMDN, APBD, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh penelitian di luar DKI Jakarta. Padahal, sebagai pusat perekonomian nasional dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa dan keuangan modern, DKI Jakarta berpotensi menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna menganalisis pengaruh investasi domestik (PMDN), belanja pemerintah daerah (APBD), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta periode 2014–2023. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mutakhir yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.

OPERATIONAL DEFINITION

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut UU Nomor 25 tahun 2007 (Indonesia, 2007) tentang penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia oleh penanam modal dalam negeri, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2024) menjelaskan bahwa PMDN mencerminkan tingkat kepercayaan investor domestik terhadap kondisi ekonomi daerah serta merupakan indikator penting kapasitas investasi sektor produktif. Menurut (M. P. Todaro & Smith, 2020), investasi, termasuk investasi domestik, berperan penting dalam meningkatkan output dan kesempatan kerja karena mendorong proses akumulasi modal. Sementara menurut teori pertumbuhan (Solow, R. M. 1956), akumulasi modal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka pendek. Dalam konteks penelitian ini, PMDN diartikan sebagai total nilai investasi dalam bentuk rupiah miliar yang ditanamkan oleh investor domestik di suatu daerah dalam satu tahun, yang berfungsi sebagai indikator kemampuan daerah menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. (Halim, 2019)

menjelaskan bahwa peningkatan belanja daerah, jika dikelola secara efektif, dapat meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang mendukung produktivitas daerah. Menurut teori Keynesian, pengeluaran pemerintah (government expenditure) memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap total output ekonomi (Keynes, 1936). Dalam penelitian ini, APBD diukur dalam persentase terhadap total pendapatan daerah, dan digunakan untuk mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS)., 2024), tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja pada suatu wbadailayah dan waktu tertentu. Menurut teori ekonomi klasik (Smith, 1776) dan (Keynes, 1936), pengangguran mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. (Mankiw, 2021) menambahkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan rendahnya efisiensi pasar tenaga kerja serta menurunkan output potensial ekonomi. Kaitan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh Hukum Okun, yang menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pengangguran akan menurunkan output riil suatu wilayah sebesar lebih dari 1%. Dalam konteks penelitian ini, tingkat pengangguran terbuka diukur dalam persentase dan digunakan sebagai indikator efisiensi ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu (Badan Pusat Statistik (BPS)., 2024). Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip yang sama dengan Produk Domestik Bruto (GDP) pada level nasional, namun dibatasi dalam wilayah administratif tertentu. Menurut teori pertumbuhan ekonomi (Solow, R. M., 1956) dan (Harrod & Domar, 1939), PDRB dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Pertumbuhan PDRB mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah, termasuk efektivitas kebijakan fiskal, tingkat investasi, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, PDRB diukur dalam satuan miliar rupiah dan digunakan sebagai variabel dependen yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh investasi (PMDN), kebijakan fiskal (APBD), dan kondisi pasar tenaga kerja (pengangguran terbuka).

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang menggabungkan data dari Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk data time series periode 2014-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dengan penyajian laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) sebagai variabel terikat dalam bentuk miliar (Rupiah). Variabel bebas terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam bentuk miliar (Rupiah), Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk persentase (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam bentuk persentase (%).

PENUTUP

This section contains conclusions and suggestions. Conclusion is a brief, clear, and precise statement of what is obtained contains advantages and disadvantages, can be proven, and directly related to the purpose of research. Suggestion is a follow-up study that is still needed to refine the results of research in order to be efficient.

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini mengungkap hubungan antara penanaman modal, belanja pemerintah daerah, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Model regresi yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 PMDN + \beta_2 APBD + \beta_3 TPT + e$$

Keterangan:

Y : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

X1 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

X2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

X3 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

β_0 : Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Variabel Independen.

e : Error Term.

RESULT AND DISCUSSION

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui permasalahan dalam

model regresi. Untuk memperoleh model regresi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam uji asumsi klasik maka harus memenuhi asumsi-asumsi dan apabila telah melewati pengujian asumsi klasik, maka data harus lulus pengujian asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah variabel, mengetahui apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal di sebaran normal atau tidak. Uji Normalitas dapat digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan diambil dari populasi normal (Astuti et al, 2017). Pada uji normalitas digunakan yaitu uji normalitas Skewness dan Kurtosis untuk melihat kenormalan pada data yang diuji (Sujarweni, 2015).

Tabel 1. Skewness and kurtosis tests for formality

Variabel	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kuortis)	Adj chi2(2)	Prob>chi2
e	10	0.3297	0.9401	1.06	0.5884

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas Skewness dan Kurtosis didapatkan nilai signifikansi 0,5884. Yang mana $0,5884 > 0,05$, maka data penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi sehingga analisis pada tahap selanjutnya dapat dilakukan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Pada uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser yang meregresikan variabel

independent dengan nilai absolut residual (ABS RES) (Ghozali, 2013)

- Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 maka data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05 maka data terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 2. Gjelser Lagrange Multiplier Heteroscedasticity Test OLS Gjelser Lagrange Multiplier Heteroscedasticity Test

Glejser LM Test	1.71615
Degrees of Freedom	3.0
P-Value > Chi2(3)	0.63335

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pada uji autokorelasi menggunakan uji Breusch-Godfrey karena uji ini mampu mendeteksi autokorelasi orde lebih tinggi (bukan hanya orde 1), dapat diterapkan pada model yang mengandung variabel lag dependen, serta lebih fleksibel untuk berbagai spesifikasi model regresi sehingga lebih sesuai untuk data runtut waktu dalam proses analisis.

Tabel 3. Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags (p)	chi2	df	Prob > chi2
1	0.924	1	0.3365

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Breusch-Godfrey adalah 0,3365. Dimana $0,3365 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji F

Number of obs	10
F (3, 6)	170.07
Prob > F	0.0024
R-squared	0.8951
Adj R-squared	0.8426
Root MSE	2.10E+05

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 17,07 dengan nilai probabilitas (Prob > F) sebesar 0,0024 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel PMDN, APBD, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta, sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan layak untuk menjelaskan variasi PDRB.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan suatu model persamaan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas/prediktor ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan satu variabel tak bebas/respon (Y) (Yuliara, 2016). Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh simultan maupun parsial dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel yang memengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent variable. Melalui analisis regresi linier berganda, dapat diketahui seberapa besar setiap variabel bebas memberikan kontribusi terhadap perubahan pada variabel terikat, baik secara bersama-sama maupun secara individu (Mulyono, 2019)

Tabel 5. Nilai R-Square

R-squared	Adj R-squared
0.8951	0.8426

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Nilai R-Square yang disesuaikan adalah 0,8426 menurut Tabel Model Summary. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama bertanggung jawab atas 84,26% variasi pada variabel dependen (pertumbuhan PDRB). Di sisi lain, variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini menjelaskan sisanya sebesar 15,74%.

Tabel 6. Uji F

Source	df	F	Prob>F
Model	3	17.07	0.0024

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0,0024, kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara signifikan oleh variabel PMDN, APBD, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak digunakan dan dapat digunakan untuk analisis tambahan.

Tabel 7. Uji T

Variabel	Koefisien	t	Sig
Konstanta	1051	1.06	0.332
PMDN	17.29	6.6	0.001
APBD	3554	0.45	0.671
TPT	5403	0.88	0.413

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel PMDN (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dengan nilai probabilitas 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, variabel APBD

(X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,671 dan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,413, masing-masing lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB.

Data yang digunakan menggunakan rentang tahun 2014-2023 dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan dengan STATA dan didapatkan persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

- Konstanta (β_0) = 1.051 Menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, PDRB DKI Jakarta diproyeksikan sebesar 1.051 (miliar rupiah). Nilai ini mencerminkan kontribusi faktor-faktor lain di luar variabel yang dianalisis, seperti konsumsi rumah tangga dan aktivitas sektor keuangan.
- Koefisien PMDN (β_1) = 17,290 Setiap peningkatan 1 (miliar rupiah) dalam Penanaman Modal Dalam Negeri akan meningkatkan PDRB sebesar 17,290 (miliar rupiah), dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hubungan ini menunjukkan dampak positif investasi domestik terhadap output ekonomi regional.
- Koefisien APBD (β_2) = 3.554 Setiap peningkatan 1 unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan meningkatkan PDRB sebesar 3.554 (miliar rupiah). Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional.
- Koefisien TPT (β_3) = 5.403 Setiap peningkatan 1 poin persentase dalam Tingkat Pengangguran Terbuka akan meningkatkan PDRB sebesar 5.403 (miliar rupiah). Koefisien positif ini muncul karena hubungan kompleks

antara dinamika pasar tenaga kerja dan struktur ekonomi DKI Jakarta.

Nilai Adjusted R-squared = 0,8426 menunjukkan bahwa 84,26% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (PMDN, APBD, dan TPT), sementara 15,74% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Nilai Prob > F = 0,0024 (< 0,05) menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 8. Hasil Regresi Linier Berganda

PDR B	coefficient	std. err.	t	> t	[95% conf. interval]	
PMDN	7.2900 3	.6208 36	.6	.001	0.87708	3.70299
APBD	554.00 7	958.9 43	.45	.671	15920.83	3028.84
TPT	4031.3 3	1423. 65	.88	.413	96266.92	04329.6
_cons	05135 4	96019 .2	.06	.332	1385817	488525

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi STATA, diperoleh model yang signifikan secara statistik untuk menjelaskan variabel Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan tiga variabel independen, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara parsial, hanya variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Sementara itu, variabel APBD dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB karena memiliki nilai probabilitas di atas 0,05..

PMDN memiliki koefisien sebesar 17,290, artinya setiap kenaikan satu tahun Penanaman Modal Dalam Negeri akan meningkatkan PDRB sebesar 17,290 poin, dengan asumsi variabel lain konstan. APBD memiliki koefisien positif sebesar 3554,0, yang menunjukkan adanya hubungan searah dengan PDRB. Namun, karena nilai signifikansinya sebesar 0,671 ($>0,05$), pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki koefisien sebesar 54031. Meskipun koefisiennya bernilai positif, variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,413 ($>0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka juga berkorelasi positif terhadap PDRB.

Secara keseluruhan, ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta, namun secara parsial hanya PMDN yang terbukti berpengaruh signifikan dan dapat menjadi dasar bahwa secara bersama-sama PMDN, APBD, dan tingkat pengangguran terbuka mampu menjelaskan variasi PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan sangat baik, tercermin dari nilai Prob $> F$ sebesar 0,0024 ($<0,05$) dan adjusted R-squared sebesar 0,8426 yang menunjukkan bahwa sekitar 84,26% perubahan PDRB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut dalam model.

Uji Hipotesis Parsial

Uji T

Uji statistik T digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel dan digunakan untuk membuktikan apakah masing-masing variabel (X) dan variabel (Y) berpengaruh atau tidak dan H_0 diterima sedangkan H_a ditolak atau sebaliknya (Mouren et al, 2022) Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat dari

nilai signifikansi yang tertera pada tabel Coefficients. Dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) (Sugiono, 2010).

Tabel 8. Hasil Regresi Linier Berganda

PD RB	coeffi cient	td. err.	t	> t	% interval]	[95 conf.
PM DN	7.290 03	.620 836	.6	.00 1	0.8770 8	3.702 99
AP BD	554.0 07	958. 943	.45	.67 1	15920. 83	3028. 84
TPT	4031. 33	1423 .65	.88	.41 3	96266. 92	04329 .6
_co ns	0513 54	9601 9.2	.06	.33 2	13858 17	48852 5

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

- Variabel PMDN memiliki nilai prob (signifikansi) sebesar 0,001 ($<0,05$) dengan T hitung sebesar 6,60 maka bisa di Tarik kesimpulan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta. Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan investasi domestik secara nyata mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
- Variabel APBD memiliki nilai prob (signifikansi) sebesar 0,671 ($>0,05$) dengan T hitung sebesar 0,45 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta. Hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Meskipun koefisien bernilai positif, kontribusi statistik belanja daerah terhadap PDRB tidak signifikan pada periode penelitian.
- Variabel Pengangguran Terbuka memiliki nilai prob (signifikansi) sebesar 0,413 ($>0,05$) dengan T hitung sebesar 0,88 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak

berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta. Hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam periode 2014–2023, dinamika pengangguran tidak memberikan kontribusi signifikan yang terukur terhadap fluktuasi PDRB.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) secara parsial. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel bebas) secara bersama-sama. Uji koefisien determinasi meruokan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi atau angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkan garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Hambar Sari & Inggit, 2016)

Koefisien determinasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur proporsi variasi pada variabel dependen (Y: Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X1: PMDN, X2: APBD, X3: TPT) secara bersama-sama dalam model regresi linier berganda. Nilai koefisien determinasi ini dapat diamati melalui nilai R-square (R^2) yang terdapat pada tabel Model Summary output regresi, yang secara empiris mencerminkan goodness-of-fit atau kecocokan model terhadap data observasi.

Kriteria interpretasi koefisien determinasi mengacu pada panduan standar yang banyak digunakan dalam penelitian ekonometrika, sebagaimana

dikembangkan oleh (Hair et al, 2010) yang mengklasifikasikan $R^2 \geq 0,75$ (kuat), $\geq 0,50$ (moderat), $\geq 0,25$ (lemah) dan (Ghozali, 2018) yang menekankan R^2 mendekati 1 sebagai indikator model sangat baik dengan penyesuaian bias prediktor pada adjusted R^2 .

Tabel 9. Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Source: (Hair et al, 2010)

Tabel 4. Uji F

Uji F	
Number of obs	10
F (3, 6)	17.07
Prob > F	0.0024
R-squared	0.8951
Adj R-squared	0.8426
Root MSE	2.10E+05

Source: Data yang diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4, nilai R^2 sebesar 89,51% mengindikasikan bahwa variabel independen PMDN, APBD, dan TPT secara bersama-sama mampu menjelaskan 89,51% variabilitas pada PDRB Provinsi DKI Jakarta. Tingkat penjelasan ini termasuk dalam kategori sangat kuat, yang menunjukkan model regresi memiliki daya prediksi yang sangat baik terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi regional dalam periode studi. Sisa variasi sebesar 10,49% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, atau kebijakan moneter nasional, yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 84,26% yang lebih konservatif dengan penyesuaian

terhadap jumlah prediktor dan ukuran sampel juga mengonfirmasi kekuatan model secara statistik yang handal.

Uji F simultan turut mendukung validitas model dengan statistik $F = 17,07$ dan nilai probabilitas (p -value) = 0,0024 ($< 0,05$), sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya, ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Namun, secara parsial hanya PMDN yang berpengaruh signifikan, sedangkan APBD dan TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik (Solow, R. M. 1956) dan pendekatan kunci Keynesian tentang peran investasi serta belanja publik dalam mendorong output agregat.

DISCUSSION

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB DKI Jakarta

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada periode 2014–2023. Setiap kenaikan PMDN sebesar satu miliar rupiah mampu meningkatkan PDRB secara nyata melalui akumulasi modal fisik, yang terwujud dalam bentuk pembangunan pabrik baru, infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan pelabuhan, serta fasilitas usaha modern yang secara langsung memperluas kapasitas produksi daerah (Ratna et al, 2017).

Pengaruh positif dan signifikan PMDN terhadap PDRB DKI Jakarta menunjukkan bahwa investasi domestik merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara teoritis, peningkatan investasi akan menambah stok modal, memperluas kapasitas produksi, serta menciptakan peluang kerja baru yang pada akhirnya

meningkatkan output ekonomi. Dalam konteks DKI Jakarta yang memiliki struktur ekonomi berbasis jasa dan perdagangan, PMDN menjadi instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai tambah yang tercermin pada peningkatan PDRB selama periode penelitian 2014–2023.

Secara teoritis, temuan ini selaras dengan model (Harrod & Domar, 1939) yang memposisikan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan melalui peningkatan rasio tabungan dan investasi terhadap output, model (Solow, R. M. 1956) yang menjelaskan bagaimana akumulasi modal mendorong ekonomi menuju steady-state yang lebih tinggi, serta pendekatan (Keynes, 1936) melalui efek multiplier investasi yang memperbesar permintaan agregat berdasarkan kecenderungan konsumsi marginal masyarakat. Di konteks urban seperti Jakarta, PMDN juga mendukung teori pertumbuhan endogen dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) dan mendorong inovasi melalui investasi produktif.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2022) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan PMDN terhadap PDRB DKI Jakarta, (Kurniawati et al., 2021) yang melaporkan efek pengganda kuat di Jawa Barat, (Suryani dan Putra, 2024) yang menyoroti dominasi PMDN di Bali, (Christono & Putri, 2022) yang menekankan peran terkuatnya pada periode 2010–2019, serta (Amelia, 2025) yang mengonfirmasi efek positif di Medan.

Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap PDRB DKI Jakarta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada periode 2014–2023. Fenomena ini terjadi karena komposisi APBD DKI Jakarta didominasi oleh belanja pegawai dan subsidi sosial yang menyita porsi anggaran terbesar, sehingga alokasi untuk belanja modal produktif seperti pembangunan infrastruktur fisik (jalan tol, pelabuhan, sistem drainase), pengembangan sumber daya manusia (pelatihan vokasi, pendidikan vokasional), serta fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi sangat terbatas. Selain itu, terdapat efek keterlambatan (time-lag) dari kebijakan fiskal daerah di mana implementasi proyek infrastruktur membutuhkan jeda panjang 2-3 tahun dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga konstruksi hingga akhirnya berdampak nyata pada aktivitas ekonomi yang tercermin dalam data tahunan BPS. Faktor struktural ketiga adalah karakteristik ekonomi DKI Jakarta sebagai pusat jasa nasional dengan struktur PDRB yang didominasi sektor swasta seperti jasa keuangan, perdagangan besar-menengah, informasi-komunikasi, dan properti (kontribusi sekitar 82%), sehingga dinamika investasi domestik (PMDN) serta konsumsi rumah tangga kelas menengah menjadi penggerak utama pertumbuhan, mengungguli variasi belanja pemerintah daerah.

Secara teoritis, hipotesis crowding-out yang dikemukakan oleh (Friedman, 1968) menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah berpotensi mengurangi investasi swasta melalui kenaikan suku bunga akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah serta kemungkinan bertambahnya beban pajak yang dapat menekan aktivitas ekonomi sektor swasta. Kondisi tersebut dapat menyebabkan efektivitas multiplier fiskal menjadi lebih rendah. Di sisi lain,

Hukum Wagner menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan konsekuensi dari pertumbuhan pendapatan dan perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga belanja pemerintah cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi daripada menjadi faktor utama yang mendorongnya (Wagner, 1893, sebagaimana dikutip dalam Obeng, 2022). Fenomena ini tercermin pada rasio APBD terhadap PDRB DKI Jakarta yang relatif stabil pada kisaran 8% selama periode pengamatan. Sementara itu, pendekatan Keynesian modern menekankan bahwa pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diarahkan pada belanja yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, struktur belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan subsidi, sehingga efek pengganda fiskal yang dihasilkan belum optimal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Arifin, 2022). yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya belum signifikan dan cenderung baru terlihat dalam jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian di kota-kota besar Indonesia. (Mulyono, 2019) melaporkan bahwa APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah akibat dominasi belanja pegawai dan time lag implementasi proyek. (Widodo, 2020) menemukan efek multiplier fiskal yang lemah di Surabaya karena alokasi belanja modal yang

terbatas, sementara (Pratiwi, 2021) mengonfirmasi pengaruh APBD yang minim di Medan disebabkan prioritas infrastruktur yang rendah. (Susanto, 2022) juga membuktikan bahwa di Bandung, peran APBD kalah dominan dibandingkan investasi swasta, dan (Rahayu, 2023) menegaskan bahwa efektivitas APBD pada wilayah metropolitan sangat bergantung pada proporsi belanja modal. Pada tahun 2025, APBD DKI Jakarta lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial ketimbang penggerak ekspansi ekonomi, sehingga implikasi kebijakannya mencakup realokasi anggaran melalui e-procurement, skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP), serta penganggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting/OBB) dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI). Tidak signifikannya APBD dalam penelitian ini diduga disebabkan oleh dominasi belanja rutin, keterbatasan proporsi belanja modal produktif, serta adanya time lag antara realisasi belanja pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap PDRB DKI Jakarta

Secara parsial, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta pada periode 2014-2023 meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif yang bersifat anomali akibat keterbatasan ukuran sampel dan volatilitas data time-series. Keterbatasan utama indikator TPT resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terletak pada ketidakmampuannya menangkap sebagian besar pekerja informal di Jakarta yang tidak masuk kategori pengangguran terbuka, sehingga

indikator tersebut kurang sensitif dalam merefleksikan utilisasi tenaga kerja efektif terhadap output ekonomi secara agregat. Selain itu, struktur ekonomi DKI Jakarta yang didominasi sektor jasa seperti perbankan, perdagangan, informasi-komunikasi, dan keuangan memiliki elastisitas tenaga kerja rendah, di mana pertumbuhan output tidak selalu memerlukan penambahan buruh proporsional berkat kemajuan otomatisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas tiap pekerja.

Pasar tenaga kerja DKI Jakarta bersifat sangat heterogen, ditandai dengan sektor informal yang menyerap tenaga kerja berlebih secara fleksibel, tingkat underemployment tinggi pada pekerja muda, serta dominasi sektor tersier (perdagangan eceran, reparasi, dan keuangan) yang memberikan ketahanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara teoritis, fenomena ini sejalan dengan Hipotesis Dualisme Pasar Tenaga Kerja (Lewis, 1954) yang menyatakan bahwa di ekonomi berkembang, sektor informal menyerap surplus tenaga kerja tanpa memengaruhi secara signifikan pertumbuhan PDRB sektor modern. Akibatnya, TPT tidak berpengaruh kuat terhadap output ekonomi karena pengangguran struktural, dualisme formal-informal, informalitas tinggi, kesenjangan keterampilan (skill mismatch) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri, serta efek discouraged worker di mana pekerja potensial menyerah mencari pekerjaan formal akibat kompetisi ketat dan ekspektasi rendah (Lewis, 1954; Witjacksono, 2009).

Secara empiris, temuan ini konsisten dengan penelitian di kota-kota besar Indonesia, (Setiawan, 2018) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak

berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jakarta karena penyerapan tenaga kerja sektor informal, (Nugroho, 2020) yang menyoroti dominasi sektor jasa mengurangi sensitivitas TPT di Surabaya, (Lestari, 2021) yang mengaitkan underemployment pekerja muda dengan lemahnya hubungan pengangguran-pertumbuhan di Bandung, (Hajji, M. S., & Nugroho, S. B. M., 2013) yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Jawa Tengah, serta (Sari, 2023) yang mengonfirmasi TPT bukan prediktor utama di ekonomi berbasis jasa dan informal. Studi panel kabupaten/kota DKI Jakarta periode 2014–2021 menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh, sementara riset di repository Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) mencatat Pajak Daerah (PAD), investasi, dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB jangka panjang dengan TPT tidak dominan. Implikasinya, pengembangan indikator holistik yang mencakup TPT, pekerja informal, underemployment, dan kesenjangan keterampilan; penerapan pelatihan vokasi digital untuk sektor unggulan seperti informasi-komunikasi dan keuangan; serta integrasi data Badan Pusat Statistik (BPS)-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan big data untuk monitoring real-time guna sinergi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam mendorong PDRB berkelanjutan. Ketidaksignifikanan TPT menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran terbuka belum mampu menjelaskan variasi PDRB secara langsung. Hal ini

dapat disebabkan oleh besarnya sektor informal dan karakteristik ekonomi DKI Jakarta yang didominasi sektor jasa sehingga pertumbuhan output tidak selalu diikuti perubahan tingkat pengangguran.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara simultan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada periode 2014–2023, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh keterkaitan antara investasi domestik, belanja pemerintah daerah, dan kondisi pasar tenaga kerja. Secara parsial, PMDN terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sehingga investasi domestik menjadi faktor yang paling nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, sedangkan APBD dan TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara tersendiri, yang mengindikasikan bahwa efektivitas belanja daerah serta kondisi pasar tenaga kerja masih perlu terus dibenahi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

CLOSING REMARKS

Penelitian ini menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta periode 2014–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB DKI

Jakarta, yang menandakan bahwa investasi domestik, belanja daerah, dan kondisi pasar tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Secara parsial, PMDN menunjukkan pengaruh positif dan signifikan serta menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan APBD dan TPT tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan investasi domestik perlu menjadi perhatian utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, sementara optimalisasi belanja daerah dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja tetap diperlukan agar pembangunan ekonomi berlangsung lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif.

RECOMMENDATION

Pemerintah Daerah DKI Jakarta disarankan untuk memperkuat iklim investasi domestik melalui penyederhanaan perizinan usaha, pemberian insentif fiskal bagi sektor-sektor produktif, dan pengembangan kawasan industri terpadu guna memaksimalkan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan dengan meningkatkan proporsi alokasi belanja modal produktif, seperti infrastruktur digital, transportasi massal, dan pelatihan vokasi, minimal 30% dari total belanja, serta meluncurkan program pelatihan vokasi berbasis big data untuk mengurangi underemployment pekerja muda dan mengintegrasikan sektor informal ke dalam rantai nilai ekonomi formal.

Bagi peneliti selanjutnya, analisis komparatif antarprovinsi dengan struktur ekonomi serupa (Jawa Barat, Banten,

Jawa Timur) menggunakan data panel periode 2010–2025 direkomendasikan untuk menguji generalisasi temuan; integrasi variabel makroekonomi seperti investasi asing langsung (FDI), inflasi, suku bunga Bank Indonesia Rate, dan Indeks Persepsi Korupsi dalam model Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menganalisis interaksi struktural antarvariabel

serta pengembangan indikator komposit ketenagakerjaan yang mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pekerja informal, underemployment, dan skill mismatch guna pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengaruh pasar tenaga kerja terhadap PDRB. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan pendekatan ekonometrika spasial untuk mengidentifikasi disparitas pertumbuhan antar-kabupaten/kota di DKI Jakarta serta dampak spillover ke provinsi tetangga.

REFERENCE

- Amelia. (2025). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*.
- Arifin. (2022). *Studi tentang efektivitas belanja daerah di wilayah metropolitan*.
- Aryani. (2022). *Analisis Pengaruh Investasi terhadap PDRB DKI Jakarta*.
- Astuti et al. (2017). *Uji normalitas dalam penelitian statistik*.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2024). *Laporan Penanaman Modal Dalam Negeri*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Data PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Statistik Ekonomi DKI Jakarta*.
- Blanchard, O., & Johnson, D. (2013). *Macroeconomics*.

- Christono, & Putri. (2022). *Pengaruh PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*.
- Friedman, M. (1968). *The Role of Monetary Policy*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.
- Hair et al. (2010). *Multivariate Data Analysis*.
- Hajji, M. S., & Nugroho, S. B. M. (2013). *Analisis PDRB, inflasi, upah minimum provinsi, dan angka melek huruf terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1990–2011*. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 1–10.
- Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*.
- Harrod, R. F., & Domar, E. D. (1939). *Model Harrod-Domar*.
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan kependudukan dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 257–282.
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan dan Pedoman APBD*.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.
- Kurniawati et al. (2021). *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat*.
- Lestari. (2021). *Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Bandung*.
- Lewis, W. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics*.
- Mouren et al. (2022). *Metodologi uji hipotesis dalam regresi*.
- Mulyono. (2019). *Pengaruh APBD terhadap PDRB di Jawa Tengah*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*.
- Nugroho. (2020). *Analisis Pengangguran dan PDRB di Surabaya*.
- Obeng, S. K. (2022). *On the determinants and interrelationship of components of government spending*. *Review of Development Economics*, 26(4).
- Pratiwi. (2021). *Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*.
- Rahayu. (2023). *Efektivitas APBD di wilayah metropolitan*.
- Ratna et al. (2017). *Dampak investasi terhadap PDRB*.
- S Sukirno. (2013). *Ekonomi Pembangunan*.
- Sari, et al. (2023). *Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi di DKI Jakarta*.
- Setiawan. (2018). *Analisis Pengangguran di DKI Jakarta*.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*.
- Solow, R.M. (1956). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.
- Suryani dan Putra. (2024). *Pengaruh Investasi, APBD, dan Pengangguran terhadap PDRB di Bali*.
- Susanto. (2022). *Peran APBD di Bandung*.
- Todaro, M. P. , & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*.

- Widodo. (2020). *Analisis APBD dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat*.
- Witjaksono. (2009). *Dualisme pasar tenaga kerja di Indonesia*.
- Yuliara. (2016). *Analisis Regresi Linier Berganda*.